BAB I

PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya kebutuhan hidup individu maupun kelompok. Kondisi kemiskinan ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Permasalahan rumah tidak layak huni merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu lekat dalam kehidupan wilayah pedesaan maupun perkotaan yang menjadi focus perhatian Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Indonesia. Rumah tidak layak huni dapat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Iwa Koswaradalam situs online (<http://nasional.republika.co.id/>) menyatakan: “Kondisi kemiskinan Indonesia semakin memburuk akibat krisis ekonomi pada tahun 1998. Namun ketika pertumbuhan ekonomi yang sempat menurun akibat krisis dapat teratasi dan dapat dipulihkan, kemiskinan tetap saja sulit untuk ditanggulangi. Pada tahun 1999, 27% dari total penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebanyak 33,9% penduduk desa dan 16,4% penduduk kota adalah orang miskin. Sebagai kota metropolitan, Kota Bandung tak lepas dari masalah kemiskinan. Berdasarkan data dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, jumlah penduduk miskin terbilang signifikan karena mencapai lebih dari 10 persen dari jumlah warga Kota bandung.”

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan: “Jumlah warga miskin di Kota Bandung sudah mencapai  304.939 jiwa, data ini berdasarkan jangka waktu 2013-2018 dari standar kemiskinan ini menurut menurut. Total jumlah warga miskin di Bandung ada 304.939 jiwa yang termasuk dalam 79.573 kepala keluarga (KK) yang terdapat di beberapa kecamatan yang tingkat kemiskinannya tinggi adalah Babakan Ciparay, Kiara Condong, Jamika dan yang tertinggi yaitu Babakan Ciparay. Jumlah ini berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018.”

Program dan kegiatan yang telah pemerintah lakukan untuk hal tersebut. Di bidang regulasi, pemerintah telah menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Tabungan Pemerintah (RUU Tapera) yang telah memasuki tahap finalisasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai tindak lanjut dan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Program ini khusus pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang jumlahnya meningkat setiap tahun. Definisi tentang BSPS menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 13 tahun 2016 yaitu definisi mengenai Program bantuan stimulan perumahan swadaya. BSPS adalah program yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya di singkat BSPS merupakan bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Jamil Ansari dalam situs online (<http://www.sayangi.com/>, Sabtu, 28/09/2013 - 13:33) menyatakan: “Masalah perumahan yang tidak layak merupakan salah satu persoalan yang hampir dialami oleh semua kota-kota besar, Untuk itu, menurut Jamil, setiap kepala daerah dan aparat pemerintahannya di daerah juga dinilai perlu memberikan perhatian khusus guna menangani masalah tersebut. Kemenpera juga telah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang selanjutnya program tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi (SKPD) selaku unit kerja provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan sub bidang perumahan. Penerima bantuan diwajibkan untuk memenuhi syarat ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah memperoleh bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat, berepenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat, diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya dan bersedia membuat pernyataan.

 Rumah tidak layak huni menurut Surat Edaran Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/M/PR.01.03/01/2012 adalah sebagai berikut: “Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi standar layak huni yang mencakup kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan”. Total rumah tidak layak huni di Indonesia hingga saat ini tidak kurang dari 4,8 juta unit. Sebagai upaya pemerintah untukmengatasi permasalahan rumah tidak layak huni, pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat mencanangkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadayaatau yang lebih dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah. Pada tahun 2015 dan 2016 Kementerian Perumahan Rakyat menargetkan sasaran dari program ini sebanyak 500.000 unit setiap tahunnya di seluruh Indonesia. Jumlah ini dua kali lipat lebih banyak daripada pada tahun 2015 yang hanya menargetkan 250.000 unit.

 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sendiri merupakan salah satu program yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan, (3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana yang dimaksud ayat 2 dapat berupa: a) Subsidi perolehan rumah; b) Stimulan rumah swadaya; c) Insentif perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan; d)Perizinan; e) Asuransi dan penjaminan; f) Penyediaan tanah; g) Sertifikasi tanah; dan/atau h) Prasarana, sarana, dan utilitas umum. Selanjutnya, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/ PMK.05/ 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/ Lembaga, serta petunjuk-petunjuk teknis yang berupa surat edaran yang dikeluarkan Kementrian Perumahan Rakyat.

 Penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yaitu masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki kemampuan memenuhi lebih setengah dari kebutuhan dasarnya, tapi tidak mampu memenuhi kecukupan kebutuhan dasarnya dan penerima bantaun stimulant swadaya meliputi perseorangan atau kelompok. Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan Surat Edaran Kementrian Perumahan Rakyat Nomor 25/SE/DS/4/2012 (MBR) adalah: “Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya belisehingga perlu mendapat dukungan dari pemerintah untuk memperoleh rumah. Standar maksimum penghasilan calon penerima bantuan adalah Rp.1.250.000 per bulan. Selain berpenghasilan rendah dan menempati rumah tidak layak huni penerima bantuan diutamakan dari masyarakat yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah, yang dibuktikan dengan memiliki tabungan bahan bangunan, sebelumnya telah memulai membangun rumah, memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan, serta didahulukan yang sudah diberdayakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Adapun besarnya bantuan untuk masing-masing penerima bantuan ialah Rp. 6.000.000,- dengan sumber pendanaannya dari APBD”. Lingkup bantuan stimulan ini adalah untuk pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas rumah, dan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Ketentuan tanah bagi penerima bantuan stimulan swadaya yaitu tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas, tidak dalam sengketa dan lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah. Program bantuan stimulant perumahan swadaya diharapkan dapat membantu masyarakat miskin agar bisa meningkatkan kualitas rumahnya agar menjadi lebih layak huni. KEMENPERA akan terus mendorong masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kualitas rumahnya sendiri sehingga menjadi layak huni.

Program bantuan stimulant swadaya pelaksanaannya untuk tahun 2016 telah dilaksanakan di berbagai wilayah, khususnya di daerah Kota Bandung program tersebut telah di laksanakan di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik. Jumlah penerima program bantuan stimulant swadaya di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Menurut Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat yaitu sejumlah 37 kepala keluarga yang berlokasi di 7 RW yaitu RW 01, RW 02, RW 04, RW 05, RW 06, RW 08, RW 11 dan RW 16 dari jumlah 16 RW yang berada di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik.

Masalah rumah layak huni apabila sudah terselesaikan maka akan terwujud kesejahteraan sosial yang diharapkan oleh masyarakat tersebut. Definisi rumah tidak layak huni dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 16 yaitu yang selanjutnya disingkat RLTH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Pada prinsipnya, masyarakat harus dapat memiliki rumah layak huni dan memenuhi kebutuhannya, karena untuk melaksanakan peranannya sesuai dengan konsep keberfungsian sosial. Keberfungsian dapat dikatakan suatu kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan menghadapi pemecahan masalah sosial.

Individu atau masyarakat perlu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalankan peranan sosialnya dalam mewujudkan fungsi sosialnya. Peranan sosial masyarakat harus dapat menjalankan peranan sosial dengan nilai dan norma yang diharapkan serta status sosialnya dimasyarakat secara semestinya. Partisipasi dan kepedulian harus bisa dijalankan oleh masyarakat agar perbaikan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Manfaat dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diharapkan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kualitas rumahnya sendiri sehingga menjadi layak huni. Sasaran program adalah perseorangan atau kelompok yang berpenghasilan rendah serta memiliki rumah yang tidak layak huni. Bentuk programnya yaitu dengan uang atau barang berupa bahan bangunan untuk rumah atau prasarana, sarana dan utilitas umum.

Kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni, sebaiknya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ikut berpartisipasi dan peduli. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis merasa tertarik untuk menelaah hal tersebut dalam penelitian dengan judul: “Pengaruh program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung”.

Penelitian ini sesuai dengan salah satu topik penelitian pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Friedlander (1977) dalam Soehartono (2008: 15) sebagai berikut: “Studi tentang sejarah lembaga-lembaga amal, perundang-undangan kesejahteraan sosial, program-program kesejahteraan sosial dan konsep-konsep kesejahteraan sosial”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta kontribusi dalam pengembangan ilmu kesejahteraan sosial dan profesi pekerjaan sosial, melalui sumbangan pemikiran mengenai pengaruh bantuan stimulant perumahan swadaya terhadap dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

## 1.2.Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung?
2. Bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung?

## 1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1.Tujuan Penelitian

 Tujuan dari penelitian tentang pengaruh pelaksanaan program bantuan uang muka terhadap Pemenuhan kebutuhan dasar pada masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan ArcamanikKota Bandung adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis :

1. Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pada masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung
2. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak mendapatkan program bantuan stimulan perumahan swadaya dan masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pada masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan ArcamanikKota Bandung
3. Pengaruh pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan ArcamanikKota Bandung

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

 Penelitian dibutuhkan untuk memberi manfaat yang signifikan dalam suatu realita sosial serta dibutuhkan manfaat bagi penulis. Maka dari itu, penulisan usulan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, masyarakat yang telah mendapatkan bantuan maupun masyarakat yang belum mendapatkan bantuan serta pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksaan program bantuan stimulan swadaya di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pekerjaan sosial terutama di sekitar daerah rumah tidak layak huni di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan ArcamanikKota Bandung

b. Manfaat Praktis

 Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai pemecahan masalah-masalah dan saran kepada masyarakat, masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, sehingga mereka dapat memahami hal yang berkaitan dengan pengaruh program bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan ArcamanikKota Bandung.

## 1.4 Kerangka Pemikiran

 Penelitian dalam kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan sosial yang dihadapi, jenis-jenis penelitian pekerjaan sosial yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Dengan berbagai langkah dalam melakukan penelitian tersebut. Kesejahteraan sosial merupakan ilmu terapan, ilmu yang saling meminjam dari disiplin ilmu yang lain, seperti psikologi, antropologi, hukum, ekonomi dan disiplin ilmu lain. Kesejahteraan sosial memiliki tiga kerangka nilai, meliputi *Body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *Body of value* (kerangka nilai) dan *Body of skills* (kerangka keterampilan). Ketiga kerangka ini harus dimiliki oleh pekerja sosial dalam melakukan intervensinya. Konsep kesejahteraan sosial adalah menolong individu untuk menolong dirinya sendiri (*helping people to helping themselves*).

 Masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Kelurahan Sukamiskin Kota Bandung merupakan permasalah kesejahteraan sosial. Dimana hal tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat serta Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait untuk meningkatkan kesejahteraan sosial warga masyarakat Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Definisi kesejahteraan sosial menurut Suharto (2010: 3) adalah sebagai berikut:

 Kesejahteraan Sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktifitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga - lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan konstribusi terhadap pemacahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu.

 Definisi tersebut tersirat bahwa individu, keluarga atau masyarakat yang mampu mengatasi masalah sosialnya akan lebih sejahtera. Begitu juga keluarga atau masyarakat yang kebutuhannya terpenuhi, seperti kebutuhan makanan, pakaian, rumah, pendidikan, kesehatan, air bersih dan transportasi akan merasa sejahtera. Demikian pula individu, keluarga atau masyarakat akan menjadi sejahtera, jika memiliki kesempatan sosial untuk mengembangkan dan merealisasikan potensi-potensinya. Tujuannya untuk meningkatkan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat baik dalam tingkatan yang rendah maupun yang tinggi agar terwujudnya suatu keberfungsian sosial masyarakat. Definisi pelayanan sosial menurut Kahn dalam Fahrudin (2012: 51) adalah sebagai berikut :

 Pelayanan sosial adalah konteks kelembagaan yang terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria pasra untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakatdan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalamkesulitan dan kebutuhan.

 Pelayanan sosial dapat dicapai dengan akses pelayanan yang berupa bimbingan dan pertolongan yang bersifat informasi dan bimbingan dan pertolongan yang melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan masalah.Definisi di atas menyatakan bahwa pelayanan sosial yang dilakukan melalui bantuan stimulant rumah swadaya diharapkan dapat menjadi akses masyarakat serta pemerintah, agar masyarakat tersebut dapat memperoleh keberfungsian sosialnya untuk memperoleh rumah yang layak huni guna terpenuhinya kebutuhan sosial, peranan sosial dan terpecahkannya masalah sosial masyarakat tersebut dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Definisi kebutuhan dasar menurut Waston dalam Hidayat dan Uliyah(2014: 6) adalah sebagai berikut :

Kebutuhan dasar manusia dibagi ke dalam dua peringkat utama, yaitu kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah *(lower order needs)* dan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi *(higher order needs)*. Pemenuhan kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah tidak selalu membantu upaya kompleks manusia untuk mencapai aktualisasi diri. Tiap kebutuhan dipandang dalam konteksnya terhadap kebutuhan lain dan semuanya dianggap penting.

Kebutuhan dasar menurut definisi diatas adalah dimensi pertama dari keberfungsian sosial. Dimensi kedua yaitu kemampuan setiap individu atau masyarakat dalam melaksanakan peranan sosialnya. Definisi peranan sosial menurut Suharto (2014: 29) adalah sebagai berikut : “Peranan sosial adalah kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya”. Definisi di atas kebutuhan dasar dapat dilihat dari dimensi-dimensinya yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan sandang, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar papan dan pendidikan serta kesehatan. Masyarakat perlu untuk memecahkan masalah kebutuhan dasar dan krisis ekonomi yang dihadapi setiap individu atau masyarakat dalam kehidupannya.

 Pekerjaan sosial suatu profesi pelayanan kepada manusia (individu, kelompok, dan masyarakat dalam memberikan pelayanan profesionalnya, pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ilmiah mengenai *human relation* (relasi antar manusia). Tujuan dari pekerja sosial adalah untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat agar dapat memecahkan masalahnya. Masalah yang dapat timbul karena kebutuhan, rintangan dan ketidak berfungsian sosial. Definisi profesi pekerjaan sosial menurut Zastrow dalam Soeharto(2009: 1) adalah sebagai berikut:

 Pekerjaan sosial merupakan aktifitas professional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai suatu tujuan tersebut.

Kebutuhan dasar dalam pemenuhannya terhadap masyarakat berdasarkan definisi-definisi diatas bahwa pemenuhan kebutuhan dasar memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk menentukan tingkat kesejahteraan dan taraf hidupnya. Selain itu masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni dapat mewujudkan rumah yang layak huni dengan didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga dapat terwujudnya perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pelaksanaan program ini diharapkan bermanfaat baik pada masyarakat maupun daerah bahkan negara.

## 1.5.Hipotesis

 Hipotesis yang diajukan pada penelitian yang berjudul: “Pengaruh program bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan ArcamanikKota Bandung” adalah :

Pernyataan Hipotesis Utama

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hipotesis Null (H0) | : | Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan Program bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan ArcamanikKota Bandung |
| Hipotesis Alternatif (H1) | : | Terdapat pengaruh pelaksanaan Program bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan ArcamanikKota Bandung |

Sedangkan pernyataan Sub Hipotesis sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | H0 | : | Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap kemampuan dalam memenuhi kebutuhan *Lower order needs*masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan ArcamanikKota Bandung |
| 2. | H1H0H1 | ::: | Terdapat pengaruh pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swaadaya terhadap kemampuan dalam memenuhi kebutuhan *Lower order needs*masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan ArcamanikKota BandungTidak terdapat pengaruh pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap kemampuan dalam memenuhi kebutuhan *Higher order needs*masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota BandungTerdapat pengaruh pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya terhadap kemampuan dalam memenuhi kebutuhan *Higher order needs*masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung |

**1.6. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah proses penelitian maka penulis mengemukakan definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Program bantuan stimulan perumahan swadaya adalah program yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatmerupakan bantuan pemerintah berupa stimulant bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
2. Tujuan dari program bantuan stimulan perumahan swadaya adalah:
3. bahwa untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulant perumahan swadaya;
4. bahwa untuk mengoptimalkan pengaturan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berupa stimulant rumah swadaya serta melaksanakan ketentuan pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
6. Kebutuhan dasar membagi kebutuhan dasar manusia ke dalam dua peringkat utama, yaitu kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah (*Lower Order Needs*) dan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi (*Higher Order Needs*). Pemenuhan kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah tidak selalu membantu upaya kompleks manusia untuk mencapai aktualisasi diri. Tiap kebutuhan dipandang dalam konteksnya terhadap kebutuhan lain dan semuanya dianggap penting.

## 1.7.Operasionalisasi Variabel

Tabel 1.1. Operasionalisasi Variabel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Dimensi | Indikator | Item Pernyataan |
| Variabel X :Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya | 1. Prosedur
 | 1. Syarat mendapatkan bantuan | 1. Kondisi rumah sebeleum mendapat bantuan 2. Kepemilikan rumah3. Memenuhi syarat administrasi4. Pembentukan kelompok5. MenyusunProposal6. Kemampuan membeli pakaian dalam setahun7. Memperhatikan jenis pakaian 8. Kebersihan pakaian9. Jumlah makan sehari–hari10. Variatif menu  makan dalam seminggu11. Memperhatikan nilai gizi12. Status tempat tinggal13. Kenyamanan tempat tinggal setelah mendapatkanbantuan14. Pemeliharaan tempat tinggal setelah mendapatkan bantuan 15. Kebersihan tempat tinggal |
|  | 2. Penerimaan Bantuan | 2. Bantuan rumah  Yang diterima |
|  |  |  |
| Variabel Y :Pemenuhan kebutuhan dasar | 1. *Lower Order Needs* | 1. Kebutuhansandang |
|  |  | 2. Kebutuhan Pangan |
|  |  | 3. Kebutuhan Papan |
|  | 2*. Higher Order Needs* | 4. Kebutuhan pendidikan5. Kebutuhan Kesehatan1. Kebutuhan Berafilasi2. Kebutuhan Berprestasi | 16. Kemampuan  membeli buku pelajaran17. Kemampuan membeli alat tulis sekolah18. Kemampuan membeli seragam sekolah19. Kemampuan membeli sepatu sekolah20. Kemampuan membeli tas sekolah21. Kemampuan biaya pengobatan22. Kerutinan  memeriksa kesehatan23. Kemampuan  dalam menghadapi tekanan di lingkungan24. Kemampuan  dalam keaktifan di lingkungan25. Kemampuan dalam mewujudkan  lingkungan  bersih26. Kemampuan dalam mewujudkan menjadi wilayah yang berkembang |

**Sumber** **: Studi Literatur, Oktober 2016**

## 1.8.Metode dan Teknik Pengumpulan Data

### 1.8.1 Metode Penelitian

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian berupa gambaran sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data yang diperoleh mula-mula dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan guna menguji kebenaran hipotesis yang diajukan.

### 1.8.2 Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

 Populasi menurut Soehartono (2011: 57) yaitu “Jumlah keseluruhan unit analisis yaitu objek yang akan diteliti”. Sampel menurut Soehartono (2011: 57) adalah sebagai berikut: “Suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya”. Pada penelitian ini yang dijadikan sampel adalah masyarakat diKelurahan Sukamiskin Kecamatan ArcamanikKota Bandung dengan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *random sampling* karena sifat populasi yang homogen. Menurut Soehartono (2011: 61) *random sampling* adalah sebagai berikut: “Cara pengambilan yang secara acak, dimana teknik sampling ini baru dapat dilakukan setelah dibuat suatu kerangka sampling yang benar. Kerangka sampling ini memuat semua unsur yang menjadi anggota populasi secara keseluruhan. Kerangka sampling ini yang perlu diperhatikan dalam unsur pembuatannya adalah agar tidak satu pun dari unsur sampling tertinggal atau terdaftar terlebih dahulu”. Populasi dalam penelitian ini adalah 74 kepala keluarga. Hasil penarikan sampel dapat dilihat dalam tabel 1.2 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2. Populasi dan Sampel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Penerima Bantuan | Populasi | Sampel (50%) | Jumlah Sampel |
| 1.2. | Kelurahan SukamiskinKecamatan Arcamanik(Rw 01, RW 02, RW 04, RW 05, RW 06, RW 08, RW 11, RW 16)Kelurahan SukamiskinKecamatan Arcamanik(Rw 03, RW 07, RW 9, RW 12, RW 13, RW 14, RW 15) | 3737 | 18,518,5 | 1919 |
| Jumlah | 74 |  | 37 |

 **Sumber:** *diskimrum.jabarprov.go.id 2016, diolah*

 Tabel 1.2 menjelaskan jumlah kelompok eksperimen (KE) diambil sebanyak 50% dari populasi yaitu 37 kepala keluarga yang telah mendapatkan program bantuan stimulant perumahan swadaya, sedangkan kelompok kontrol (KK) yaitu kepala keluarga yang belum mendapatkan program bantuan stimulant swadaya sejumlah 37 kepala keluarga.

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tentang pengaruh pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swadaya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pada masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan ArcamanikKota Bandung antara lain sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen, arsip, koran, artikel-artikel dan buku-buku serta bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data mengenai kenyataan yang berlangsung dilapangan dengan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi non partisipan yaitu teknik pengumpulan data yang ditujukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung tetapi tidak terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti tersebut.
2. Angket, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan dan diajukan kepada responden.

### 1.8.4 Alat Ukur Penelitian

 Alat ukur yang digunakan peneliti dalam pengujian wawancara menggunakan skala ordinal dengan alat ukur likert. Skala ini terdiri atas sejumlah pertanyaan yang semuanya menunjukkan sikap terhadap suatu objek tertentu. Skala likert ini mengandung kategori jawaban dengan masing-masing skor :

Nilai 5, dengan skor tertinggi.

Nilai 4, dengn skor tinggi.

Nilai 3, dengan skor cukup atau sedang.

Nilai 2, dengan skor rendah.

Nilai 1, dengan skor sangat rendah.

## 1.9 Teknik Analisis Data

 Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan dalam bentuk angka-angka. Untuk data kuantitatif digunakan uji U-MANN WHITNEY. Asumsi-asumsi yang mendasari penggunaan rumus ini adalah :

1. Kedudukan antara populasi independen, yaitu populasi yang akan dibandingkan saling tidak tergantung.
2. Skala data yang digunakan adalah skala likert.

Teknik perhitungan sampel ditentukan sebagai berikut :

 $u₁=n₁ . n₂ + n₁ =\frac{(n₁+1)}{2}∑R₁$

 $u₂=n₁ . n₂ + n₁ =\frac{(n₂+1)}{2}∑R₁$

Keterangan :

u = Simbol statistik yang dipakai dalam U-MANN WHITNEY

n₁ = Jumlah responden kelompok I

n₂ = Jumlah responden kelompok II

R₁ = Jumlah rangking kelompok I

R₂ = Jumlah rangking kelompok II

Pengujian statistik ini pada kriteria kelompok, yaitu 2 kelompok saling lepas dan keduanya memiliki skala ordinal, kemudian hasil perhitungan dari rumus U di masukan ke dalam rumus Z hitung dengan rumus :

 $ᶻhitung=\frac{ᵘskor-\frac{n₁n₂}{2}}{\sqrt{\left\{\left(\frac{n₁xn₂}{N(N-1)}\right)\left(\frac{N³N}{12}-∑T\right)\right\}}}$

Dimana :

N = n₁ + n₂

T = $\frac{t^{3}-t}{12}$

T = Banyaknya observasi yang berangka sama untuk semua rangking tertentu. Hasil perhitungan $ᶻhitung$ dibandingkan dengan $ᶻtabel$ dengan kriteria :

Ho = Ditolak, H₁ diterima jika $ᶻhitung$<$ ᵀtabel$

Ho = Ditolak, H₁ ditolak jika $ᶻhitung$>$ᵀtabel$

## 1.10 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.10.1 Lokasi Penelitian

 Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sukamiskin Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai berikut :

1. Kelurahan Sukamiskin Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik adalah wilayah yang mendapatkan Bantuan Stimulan Swaya di Kota Bandung
2. Masalah yang diteliti berkaitan dengan kajian kesejahteraan sosial.
3. Lokasi penelitian terkait dengan topik dan masalah yang diteliti penulis, sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian
4. Tersedianya data yang diperlukan guna menunjang kelancaran dari penelitian

### 1.10.2 Waktu Penelitian

 Waktu penelitian yang direncanakan penulis adalah selama enam bulan, terhitung sejak bulan November 2016 sampai April 2016 , dengan waktu kegiatan yang dijadwalkan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pelaporan